

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik masyarakat menjadi elemen esensial dalam sistem demokrasi karena merepresentasikan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum mencerminkan peran aktif individu dalam menentukan arah kebijakan negara, dan keikutsertaan mereka juga menegaskan tanggung jawab kolektif terhadap masa depan bangsa. Fenomena menurunnya partisipasi politik secara substansial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen partai politik belum sepenuhnya mendorong keterlibatan warga secara aktif dan setara dalam kanal politik formal.

Pemenuhan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya demokrasi yang berkeadilan. Kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Masyarakat hanya dapat terlibat secara bermakna apabila akses terhadap partisipasi politik tidak dibatasi oleh prosedur birokratis atau preferensi elit partai, tetapi terbuka secara setara bagi seluruh warga, sebagaimana sering diwujudkan dalam keikutsertaan dalam organisasi sosial dan partai politik.

Peran partai politik tidak hanya terbatas sebagai kendaraan kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi mediasi antara rakyat dan negara. Eksistensinya menjadi penting untuk merumuskan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat dan ideologi partai. Namun, fungsi representatif tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana proses internal partai, terutama rekrutmen kader, dilaksanakan secara terbuka, rasional, dan berbasis prinsip meritokrasi.

Rekrutmen kader politik menjadi indikator penting dari kualitas kelembagaan internal partai dalam sistem demokrasi. Pemilihan dan pembinaan kader yang kompeten menunjukkan kapasitas partai dalam menjaga kesinambungan ideologis serta profesionalisme politik. Menurut Tenar (2024), partai memiliki peran strategis dalam menyiapkan calon

pemimpin yang tidak hanya menjamin kelangsungan organisasi tetapi juga memiliki daya saing dalam memimpin di tingkat lokal maupun nasional. Di sisi lain, lemahnya sistem kaderisasi akan berakibat pada munculnya figur politik yang tidak memahami ideologi partai serta minim kapasitas kepemimpinan.

Kerangka hukum nasional telah menetapkan pedoman normatif agar partai politik melaksanakan rekrutmen secara demokratis dan inklusif. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa rekrutmen politik harus dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, realitas empirik di tingkat lokal sering kali memperlihatkan bahwa rekrutmen masih bersifat elitis, tertutup, dan dipengaruhi relasi personal yang tidak terukur secara objektif.

Kompetisi antarpolitical dalam sistem demokrasi mendorong penguatan kapasitas kelembagaan melalui strategi rekrutmen yang adaptif dan profesional. Partai yang mampu menjaring kader inovatif dan berintegritas tinggi akan memiliki keunggulan kompetitif dalam kontestasi elektoral. Hal ini sejalan dengan temuan Surbakti (1992) bahwa rekrutmen politik merupakan mekanisme strategis dalam penyaringan calon pemimpin yang efektif dalam pemerintahan. Sayangnya, pada konteks lokal seperti Kabupaten Jember, strategi rekrutmen masih sering dikendalikan oleh elit partai dan minim evaluasi berbasis kompetensi kader.

Kondisi rekrutmen politik di tingkat lokal, seperti yang terjadi di PAN Kabupaten Jember, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara idealisme normatif dan praktik lapangan. Dalam praktiknya, proses rekrutmen belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi karena masih dipengaruhi oleh kedekatan personal, loyalitas politik, atau latar belakang organisasi keagamaan tertentu. Fenomena ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan norma hukum dalam konteks lokal sebagaimana dikritisi oleh Kartono (1994) bahwa rekrutmen politik harus berbasis potensi kepemimpinan dan dedikasi terhadap nilai-nilai organisasi.

Implementasi UU No. 2 Tahun 2011 oleh PAN Kabupaten Jember memang telah dilakukan melalui digitalisasi rekrutmen menggunakan aplikasi SimPAN. Aplikasi ini menjadi bentuk respons terhadap tuntutan efisiensi dan transparansi dalam perekrutan kader, sebagaimana disampaikan oleh Nyoman Aribowo dalam observasi awal penelitian bahwa sistem ini dimaksudkan untuk membuka akses pendaftaran yang mudah dan inklusif bagi masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses digital ini belum diikuti dengan seleksi berbasis kualitas maupun penguatan ideologi kader secara berkelanjutan.

Meskipun penggunaan teknologi digital telah menjadi instrumen penting, belum terjadi integrasi yang utuh antara sistem rekrutmen administratif dan program pembinaan kader berbasis ideologis serta kepemimpinan. Kegiatan pelatihan dan pendidikan politik di PAN Jember masih dilakukan secara insidental menjelang pemilu, dan belum menunjukkan kontinuitas sebagaimana dituntut dalam regulasi tentang kaderisasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi bersifat prosedural, belum menyentuh substansi pengembangan kualitas kader secara mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, baik dari sisi fenomena maupun kesenjangan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana implementasi strategi rekrutmen politik DPD PAN Kabupaten Jember? *Kedua*, apa saja faktor pendukung dan penghambat rekrutmen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji implementasi strategi rekrutmen politik DPD PAN Kabupaten Jember dan apa saja faktor pendukung dan penghambat rekrutmen.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait peran dan strategi partai politik dalam proses rekrutmen kader. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun langkah-langkah perbaikan kelembagaan partai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan dasar pengembangan studi lanjutan. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademik dibidang Ilmu Pemerintahan maupun Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi strategi partai politik dalam rekrutmen politik.

1.4.2 Manfaat Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi PAN, khususnya di Kabupaten Jember dalam meningkatkan sistem dan kualitas proses rekrutmen politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi PAN untuk merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi kendala rekrutmen politik ditingkat daerah.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada implementasi strategi rekrutmen politik partai politik, khususnya dalam konteks rekrutmen kader partai politik.